

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan salah satu isu global yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir adalah permasalahan lingkungan hidup (Lailaningrum et al., 2026). Berbagai permasalahan lingkungan seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, polusi udara, sungai dan laut yang tercemar, permasalahan sampah, dan bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan merupakan beberapa dari banyaknya permasalahan yang sudah tidak jarang terdengar di kehidupan sehari-hari (World Economic Forum, 2025; Masdar et al., 2024). Terjadinya berbagai bencana alam tersebut seringkali tidak terpisahkan dari campur tangan aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan (UN University, 2021). Intervensi manusia terhadap ekosistem alam seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, hingga aktivitas industrial yang sering kali menghasilkan emisi tinggi menjadi salah satu faktor utama pemicu kerusakan alam yang berakibat pada berbagai permasalahan lingkungan hidup (Muhamad et al., 2025). Akumulasi berbagai aktivitas manusia tersebut kemudian berkontribusi terhadap perubahan lingkungan pada skala global.

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks di tingkat global tidak hanya menuntut perubahan perilaku di tingkat individu dan institusi pendidikan, tetapi juga mendorong lahirnya komitmen pembangunan berkelanjutan sebagai respons kolektif masyarakat internasional. Salah satu komitmen itu

diwujudkan melalui penetapan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sidang Umum pada tahun 2015 sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan dunia hingga tahun 2030. SDGs terdiri atas 17 tujuan (*goals*) yang mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan serta aksi terhadap perubahan iklim. Agenda ini menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan. Selain itu, pencapaian SDGs memerlukan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai aktor, baik dari pemerintah, organisasi, hingga masyarakat.

Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kolaborasi keberlanjutan tersebut adalah sektor pendidikan (Ihsan, 2025). Keterkaitan antara isu lingkungan dan sektor pendidikan tercermin dalam beberapa tujuan SDGs yang berorientasi pada pembentukan kesadaran dan perilaku berkelanjutan. Pendidikan lingkungan di sekolah memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan ke-4 (*Quality Education*) yang menekankan pentingnya pendidikan yang mampu membentuk kompetensi keberlanjutan, tujuan ke-12 (*Responsible Consumption and Production*) yang mendorong terciptanya pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan ke-13 (*Climate Action*) yang menggarisbawahi urgensi tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Selain menjalankan fungsi pendidikan formal, institusi pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan perilaku berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan global. (Pravitasari & Nugraheni, 2024).

Namun demikian, pencapaian target SDGs di sektor pendidikan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat (*top-down*) semata, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai aktor sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan perubahan perilaku dan budaya peduli lingkungan secara nyata (Setyorini & Asmonah, 2023).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan lingkungan hidup di sekolah, pemerintah Indonesia menciptakan salah satu kebijakan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yakni tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata. Berasal dari bahasa Sanskerta, “Adi” artinya penting, ideal atau besar “Wiyata” artinya tempat mendapatkan ilmu, norma dan etika. Adiwiyata berarti tempat yang ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta pembentukan karakter dan nilai, termasuk nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup (Masdar et al, 2024). Program Adiwiyata merupakan program pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup yang bertujuan membentuk sekolah berbudaya lingkungan melalui pengembangan perilaku peduli dan ramah lingkungan di kalangan warga sekolah (Pratiwi et al., 2020). Melalui Program Adiwiyata, sekolah diharapkan mampu menerapkan tata kelola yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercipta budaya peduli lingkungan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Program Adiwiyata merupakan salah satu program yang memiliki tujuan guna mendorong terwujudnya kesadaran dan pengetahuan warga sekolah dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan hidup (Baso et al., 2024). Selain itu

dengan adanya Program Adiwiyata diharapkan dapat mendorong terciptanya pembentukan karakter warga sekolah dengan adanya partisipasi langsung dalam usaha pelestarian lingkungan hidup di lingkungan sekolah (Maulidah & Wahyuni, 2023a). Dengan adanya Program Adiwiyata ini, sekolah dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, serta dapat mendukung suasana pembelajaran dan berperan unggul dalam membentuk perubahan bagi masyarakat sekitar sekolah.

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan yang menjadi dasar operasional dalam pelaksanaannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Prinsip partisipatif merupakan pilar pertama jadi jalannya Program Adiwiyata. Prinsip partisipatif artinya bahwa keseluruhan Program Adiwiyata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi, dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Seluruh pihak seperti kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, siswa, hingga orang tua siswa, dan masyarakat sekitar diajak berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab bersama. Dengan kata lain, program ini dapat terwujud melalui kerja sama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua siswa. Prinsip kedua yang menjadi pilar dalam jalannya Program Adiwiyata adalah berkelanjutan, artinya pelaksanaan program dilakukan secara terencana, komprehensif dan berkesinambungan sehingga bukan menjadi kegiatan sementara, namun menjadi bagian yang melekat dalam kegiatan sekolah yang konsisten dari waktu ke waktu.

Program Adiwiyata yang didasarkan pada prinsip partisipatif dan berkelanjutan menunjukkan bahwa tercapainya tujuan dan hasil pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam perspektif administrasi publik, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik dianggap penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program (Ostrom, 1996). Konsep ini menitikberatkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan saja (*passive recipients*) melainkan juga menjadi mitra aktif yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Keterlibatan tersebut dapat mendorong munculnya inovasi, meningkatkan keberlanjutan program, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dijalankan (Lember et al., 2019). Dengan demikian, dalam konteks Program Adiwiyata, keberhasilan program tidak hanya sekedar pada pemenuhan indikator administratif saja, tetapi juga oleh bagaimana peran dan kerja sama antaraktor dijalankan dalam praktiknya.

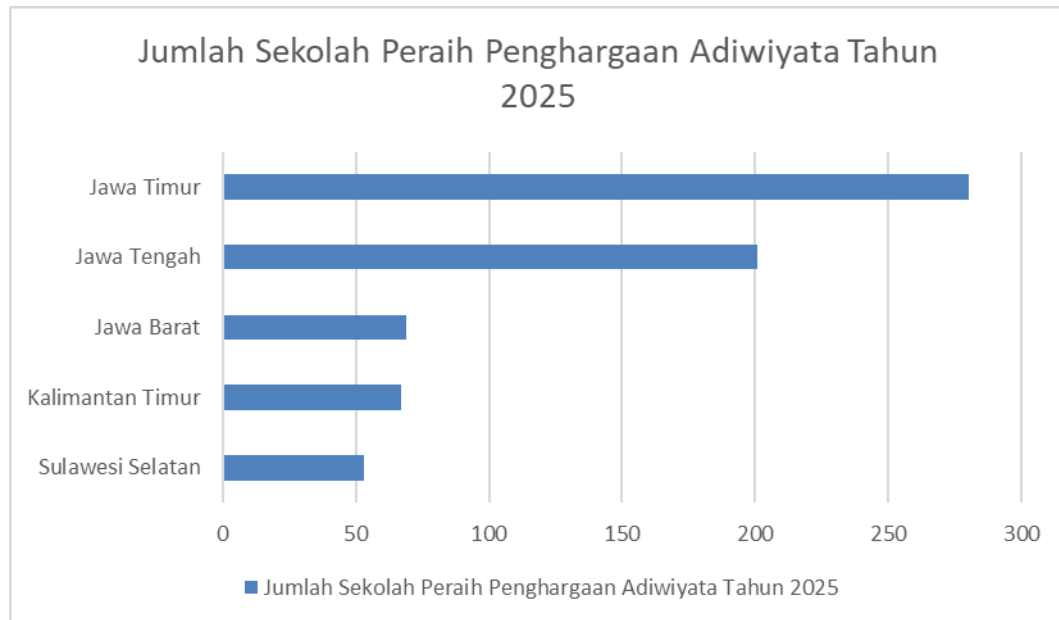
Penyelenggaraan Program Adiwiyata dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang terintegrasi dalam tata kelola sekolah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan Program Adiwiyata diwujudkan dalam bentuk penghargaan sekolah Adiwiyata. Penghargaan Sekolah Adiwiyata bisa didapatkan hanya oleh sekolah-sekolah yang telah dinilai berhasil memenuhi kriteria setelah mengintegrasikan nilai-nilai dan budaya peduli lingkungan serta melaksanakan aksi pengelolaan lingkungan di sekolah sesuai dengan aspek-aspek penilaian. Dengan demikian, sekolah yang telah mendapatkan predikat Adiwiyata dapat dikatakan sebagai

sekolah yang telah dianggap berhasil dalam membangun budaya dan karakter peduli lingkungan yang sistematis dan terimplementasi dalam tata kelola sekolah.

Penghargaan Adiwiyata dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota, Adiwiyata tingkat Provinsi, Adiwiyata tingkat Nasional, dan tingkatan tertinggi adalah Adiwiyata Mandiri. Setiap tingkatan penghargaan mencerminkan jenjang pencapaian yang berbeda, mulai dari pemenuhan indikator dasar penilaian hingga tahap dimana sekolah mampu menjadi role model dan penggerak dalam pendidikan lingkungan hidup. Sistem penghargaan berjenjang ini merupakan sebuah dorongan bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas budaya peduli lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, penghargaan program Adiwiyata memiliki nilai strategi dalam menunjukkan kemampuan sekolah dalam menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) secara menyeluruh, konsisten, dan berdampak luas.

Penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil dalam menyelenggarakan Program Adiwiyata. Pada tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian Program Adiwiyata yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2923 tahun 2025 dan Nomor 2920 tahun 2025, ada sebanyak 979 sekolah di seluruh Indonesia yang berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata. Penghargaan ini diberikan kepada 721 sekolah dari 31 provinsi yang telah meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dan ada sebanyak 258 sekolah

dari 21 provinsi yang berhasil meraih predikat Adiwiyata (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025)



Gambar 1.1 Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Berdasarkan Provinsi Tahun 2025

Sumber: Diolah peneliti dari Brilian News (2025), diakses pada 7 Juni 2025.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, Jawa Timur merupakan provinsi dengan capaian tertinggi untuk penerima Penghargaan Adiwiyata secara nasional pada tahun 2025, yakni total 280 sekolah peraih predikat Adiwiyata. Dari keseluruhan sekolah peraih predikat Adiwiyata di Jawa Timur, terdapat 186 sekolah yang berhasil meraih predikat Adiwiyata Nasional dan 94 sekolah yang berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri. Secara nasional, predikat Provinsi Jawa Timur disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan total 201 sekolah, Jawa Barat dengan 69 sekolah, Kalimantan Timur dengan 67 sekolah, dan Sulawesi Selatan dengan 53 sekolah (Brilian News, 2025).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang turut melaksanakan Program Adiwiyata sebagai bagian dari upaya pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Dalam beberapa tahun terakhir, capaian penghargaan Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data penerima penghargaan Adiwiyata, terdapat 16 sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata, baik pada tingkat Adiwiyata Nasional maupun Mandiri. Penghargaan Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Sidoarjo pertama kali diperoleh pada tahun 2023 oleh SMP Negeri 3 Candi yang menjadi sekolah pertama dan satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo yang meraih predikat Adiwiyata tertinggi pada tahun tersebut setelah dinilai berhasil menerapkan budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan (Radar Jatim, 2023). Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah sekolah penerima Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi empat sekolah, yakni SMP Negeri 1 Sedati, SMP Negeri 1 Waru, SMP Negeri 2 Sukodono, dan SDIT El Haq Sidoarjo yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Peningkatan jumlah sekolah penerima penghargaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di tingkat daerah serta mencerminkan adanya upaya pembinaan sekolah berbudaya lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Peningkatan jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata tersebut menunjukkan peningkatan komitmen dan keberhasilan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di tingkat daerah. Namun

demikian, capaian penghargaan tidak selalu secara otomatis mencerminkan keberlanjutan praktik budaya peduli lingkungan di tingkat satuan pendidikan. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah sekolah memperoleh penghargaan, intensitas partisipasi warga sekolah dapat menurun dan program tidak lagi berjalan secara konsisten (Maulidah & Wahyuni, 2023a; Pitaloka & Hariyoko, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program sering kali menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan berbasis sekolah. Kondisi ini mencerminkan bahwa keterlibatan warga sekolah sering kali belum terbangun secara konsisten dan berkelanjutan, melainkan masih cenderung bersifat administratif atau simbolik (Tilbury, 1995).

Salah satu sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri pada tahun 2025 di Kabupaten Sidoarjo adalah SMP Negeri 1 Sedati. Dalam prosesnya, SMP Negeri 1 Sedati tidak memperoleh predikat Adiwiyata Mandiri secara instan, melainkan melalui proses bertahap dan konsisten, dimulai dari meraih Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2019, Provinsi tahun 2021, Nasional tahun 2023, hingga Mandiri tahun 2025. Seluruh jenjang untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata tersebut diraih berturut-turut tanpa mengalami kegagalan seleksi (*one-shot approval*). Selama proses pencapaian penghargaan tersebut, SMP Negeri 1 Sedati mengalami satu kali pergantian kepala sekolah dan tiga kali pergantian ketua tim Adiwiyata. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan, keberlanjutan Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati tetap terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati tidak ditentukan oleh siapa yang

memimpin, tetapi oleh komitmen kolektif warga sekolah yang telah terbentuk secara konsisten.

SMP Negeri 1 Sedati tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam perolehan penghargaan Adiwiyata, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan data Rapor Pendidikan tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sekolah tersebut mengalami peningkatan pada lima dari enam aspek penilaian utama, yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter murid, keamanan sekolah, serta kualitas pembelajaran (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Data tersebut diperoleh melalui sistem Rapor Pendidikan yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional dan berbagai indikator mutu pendidikan lainnya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa capaian Adiwiyata Mandiri di SMP Negeri 1 Sedati tidak hanya bersifat simbolik, tetapi didukung oleh komitmen kelembagaan, partisipasi warga sekolah, konsistensi peningkatan mutu pendidikan, serta keberlanjutan program lintas kepemimpinan.

Pelaksanaan Program Adiwiyata dilaksanakan secara sistematis melalui enam aspek utama kegiatan. Pertama, aspek kebersihan yang mencakup optimalisasi fungsi sanitasi dan drainase untuk menjaga kesehatan serta mencegah genangan air di lingkungan sekolah. Kedua, pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Ketiga, penanaman dan pemeliharaan pohon sebagai upaya penghijauan dan peningkatan kualitas udara di lingkungan sekolah. Keempat dan kelima, konservasi air serta konservasi energi (listrik) yang

diterapkan melalui penghematan penggunaan sumber daya dan pengawasan pemakaian secara berkala. Keenam, inovasi penerapan Gerakan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH). Adapun implementasi Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola dan manajemen sekolah melalui pembuatan kebijakan sekolah, visi dan misi, serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran. Adapun penerapannya di lapangan disesuaikan dengan potensi serta permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekolah, sehingga pelaksanaan Adiwiyata tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kultur dan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri yang diraih oleh SMP Negeri 1 Sedati merupakan salah satu bentuk keberhasilan penyelenggaraan Gerakan PBLHS melalui Program Adiwiyata di sektor pendidikan. Keberhasilan SMP Negeri 1 Sedati mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri menunjukkan adanya praktik budaya peduli lingkungan yang berjalan dengan baik. Namun demikian, pencapaian itu tidak bisa dipahami hanya semata-mata sebagai hasil pemenuhan indikator penilaian administratif, tetapi juga didukung oleh peran kolaboratif dan partisipatif dari berbagai aktor yang terlibat dalam program tersebut.

Hal ini selaras dengan penelitian pertama yang berjudul *Systematic Literature Review: Analisis Collaborative Governance* dalam Program Adiwiyata Sekolah, yang menganalisis kolaborasi aktif antara guru, siswa, orang tua serta pemerintah tingkat daerah dalam implementasi Gerakan PBLHS melalui program

Adiwiyata di sektor pendidikan, yakni sekolah (Apriliani et al., 2024). Penelitian menemukan bahwa faktor utama keberhasilan program Adiwiyata adalah keterlibatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan, motivasi bersama, serta tindakan nyata yang berhasil meningkatkan kesadaran dan sikap peduli lingkungan siswa, guru, orang tua, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Namun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada pemetaan konsep kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan kajian literatur, sehingga belum menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana proses interaksi, pembagian peran, serta keterlibatan para aktor tersebut berlangsung secara langsung dalam praktik pelaksanaan program di tingkat satuan pendidikan.

Sedangkan penelitian kedua yang berjudul *Co-production Process of Kampung Warna Warni: Societal Active Participatory in the Urban Slum Management* menemukan bahwa partisipasi masyarakat, sektor publik, dan pemerintah Kota Malang berkolaborasi dalam *Co-production* untuk merubah salah satu kawasan kumuh di Kota Malang menjadi model pengelolaan wisata yang berkelanjutan bernama Kampung Warna Warni (Alfian et al., 2024). Inisiatif *bottom-up* ini melibatkan partisipasi aktif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan bersama sehingga berhasil menciptakan otonomi komunitas dan menarik lebih banyak dukungan swasta sehingga Kampung Warna berhasil mendapatkan pengakuan dan dukungan dari Pemerintah Kota Malang sebagai role model untuk pengelolaan kawasan kumuh lainnya.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lingkungan tidak hanya didefinisikan oleh kebijakan formal, tetapi juga didukung oleh dinamika partisipasi dan inisiatif yang tumbuh dari masyarakat (*bottom-up*). Praktik pada Kampung Warna Warni memperlihatkan bagaimana keterlibatan aktif masyarakat mampu mendorong transformasi kawasan secara berkelanjutan. Karakteristik serupa juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan Program Adiwiyata, di mana capaian hingga tingkat Mandiri tidak hanya bergantung pada arahan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada inisiatif dan konsistensi warga sekolah dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menggambarkan bagaimana proses keterlibatan antar aktor tersebut berlangsung di tingkat satuan pendidikan, khususnya pada sekolah yang berhasil mencapai Adiwiyata Mandiri, masih terbatas.

Karakteristik pelaksanaan Program Adiwiyata pada dasarnya menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor dalam setiap tahapan kegiatan program di sekolah (Masdar & Kamal, 2024). Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pembina sekaligus penilai program, sementara pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta siswa terlibat dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai kegiatan lingkungan yang menjadi bagian dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Dalam praktiknya, beberapa kegiatan juga melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat sekitar, komunitas lingkungan, maupun sektor swasta yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan di sekolah. Pola keterlibatan

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kerja sama antar lembaga sebagaimana dalam pendekatan *collaborative governance*, maupun sekadar partisipasi masyarakat sebagai penerima kebijakan, melainkan memperlihatkan adanya keterlibatan langsung berbagai aktor dalam menjalankan dan menghasilkan kegiatan program secara bersama-sama.

Berbagai kajian mengenai Program Adiwiyata telah banyak dilakukan, baik yang menitikberatkan pada implementasi kebijakan, evaluasi, maupun kolaborasi dalam pelaksanaannya. Namun demikian, kajian yang secara khusus menggunakan perspektif *co-production* untuk melihat bagaimana proses keterlibatan, pembagian peran, serta kontribusi antaraktor dalam setiap tahapan pelaksanaan program masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Hal ini penting untuk dikaji mengingat pelaksanaan Program Adiwiyata pada praktiknya melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kontribusi yang berbeda dalam setiap tahapan kegiatan program. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola hubungan dan interaksi antara seluruh aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan program secara berkelanjutan.

Kondisi ini membuka celah bahwa diperlukan kajian yang menggali lebih dalam bagaimana praktik *co-production* berlangsung dalam program Adiwiyata di sektor pendidikan. Terdapat permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana proses pelaksanaan Program Adiwiyata berlangsung melalui keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, warga sekolah dan sektor swasta, termasuk pembagian peran dan kontribusi antar aktor tersebut membentuk keberlanjutan program di SMP Negeri 1 Sedati. Oleh karena itu, maka penulis

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “*Co-production* dalam Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati Kabupaten Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses *co-production* dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *co-production* dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sedati Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai konsep *co-production* dalam penyelenggaraan program Adiwiyata di sektor pendidikan sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis penulis mengenai konsep *co-*

production terutama dalam penyelenggaraan program publik di sektor pendidikan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbang kontribusi akademik bagi perkembangan kajian administrasi publik dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti yang lain apabila berkeinginan melakukan pengembangan kajian yang sama di masa depan, khususnya dalam topik *co-production* dalam penyelenggaraan program publik di sektor pendidikan.

3. Bagi SMP Negeri 1 Sedati

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses kolaboratif yang berlangsung pada pelaksanaan program sekolah Adiwiyata, terutama dalam pencapaian penghargaan Adiwiyata Mandiri. Selain itu, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi dokumentasi praktik baik (*best practice*) yang dapat dijadikan referensi bagi sekolah lain dalam pengembangan budaya peduli lingkungan, khususnya dalam program sekolah Adiwiyata.